

January 2021

Konflik Minoritas di Timur Tengah: Studi Kasus Konflik Etnis Kurdi

Bahy Chemy Ayatuddin Assri
UIN Sunan Kalijaga, bahychemy@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis>



Part of the [Civil Law Commons](#), and the [Near and Middle Eastern Studies Commons](#)

Recommended Citation

Assri, Bahy Chemy Ayatuddin (2021) "Konflik Minoritas di Timur Tengah: Studi Kasus Konflik Etnis Kurdi," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*: Vol. 8 : No. 1 , Article 6.

DOI: 10.7454/meis.v8i1.132

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis/vol8/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Middle East and Islamic Studies* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONFLIK MINORITAS DI TIMUR TENGAH: STUDI KASUS KONFLIK ETNIS KURDI

Abstract

This paper attempts to explain the roots of the Irak and Syria Kurdish ethnic conflict by using the analysis of the Broken Windows theory. The theory that was conceived by a criminologist named George L. Kelling and Cathrine M. Coles is trying to explain something small, if not addressed, it will cause something big. An epidemic will spread depending on the community and the environment. Just like what happened with the Kurds in the Middle East. This group received unfair treatment by the local regime, so the epidemic of freedom and having its own territory spread. A wave of resistance continues to be launched, ranging from the small to the large. Finally, something small can become a big issue, for example Kurdish forces in Iraq and Syria have trained troops and they use the chaotic environment to conduct a referendum on autonomous regions. It means something small (the Kurdish Ethnic resistance movement) that is not given much attention, then presents something big (like Kurdish forces in Iraq and Syria supported by the US to hold a referendum).

Keywords: *Kurdish Ethnic, Broken Windows Theory, Epidemic, Wave of Resistance*

Abstrak

Tulisan ini berusaha memaparkan tentang akar konflik Etnis Kurdi Irak dan Suriah dengan menggunakan analisis teori Broken Windows. Teori yang digagas oleh kriminolog bernama George L. Kelling dan Cathrine M. Coles ini berusaha memaparkan sesuatu yang kecil, apabila tidak diperhatikan maka akan menimbulkan sesuatu yang besar. Sebuah epidemi akan menyebar tergantung kepada masyarakat dan lingkungan. Sama seperti apa yang terjadi dengan Etnis Kurdi di Timur Tengah. Kelompok ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh rezim setempat, sehingga epidemi akan kebebasan dan memiliki wilayah sendiri tersebar. Gelombang perlawanan terus dilancarkan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Akhirnya sesuatu yang kecil bisa menjadi perkara besar, contohnya pasukan Kurdi di Irak dan Suriah memiliki pasukan yang sudah terlatih dan mereka memanfaatkan keadaan sekitar yang sedang kacau untuk melakukan referendum wilayah otonom. Artinya sesuatu yang kecil (gerakan perlawanan Etnis Kurdi) yang tidak terlalu diperhatikan, kemudian menghadirkan sesuatu yang besar (seperti pasukan Kurdi di Irak dan Suriah yang didukung oleh AS untuk melaksanakan referendum).

Kata Kunci: *Etnis Kurdi, Teori Broken Windows, Epidemi, Gelombang Perlawanan*

PENDAHULUAN

Secara geografis, keberadaan Timur Tengah sangatlah dibutuhkan

karena letaknya strategis dibanding daerah lain, baik dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Di samping itu, wilayah Timur Tengah ialah wilayah yang menjadi pusat kemunculan agama-agama samawi, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi (Surwardono, 2011:125). Selain sebagai pusat kemunculan agama-agama samawi, Timur Tengah memiliki keistimewaan yang lain, yaitu sebagai pusat peradaban manusia. Timur Tengah sangat unggul di bidang ekonomi, politik, dan strategi, karena didukung dengan sumber alamnya (Salim, 2001:11). Timur Tengah juga terkenal dengan kekayaan minyaknya, sehingga tak heran konflik terus membara hingga sampai ini, baik dari konflik agama, etnis, maupun geografis.

Jika diamati secara seksama, etnis merupakan unsur terpenting yang dapat berpotensi mempengaruhi kestabilan sosial, ekonomi, politik, dan budaya suatu negara. Apabila semua etnis saling bekerjasama, bergotong-royong, dan saling mengerti antara satu sama lain, maka konflik antar etnis dapat diminimalisir, walaupun tidak bisa dihilangkan, karena sifat orang Arab yang cinta akan etnisnya. Apabila sudah minimal tingkat konflik etnis, maka mudah bagi negara untuk mengontrolnya (Danisworo, 2013:2).

Salah satu etnis yang sampai sekarang masih diselimuti dengan konflik yang berkepanjangan ialah Etnis Kurdi. Etnis Kurdi sempat merasakan zaman keemasannya di dalam sejarah. Etnis ini memiliki tokoh sekaligus pejuang perang yang sangat gigih, ialah Salahuddin Al-Ayubi dan juga Ibnu Taimiyyah, yang buku-bukunya masih menjadi sumber rujukan hingga saat ini.

Etnis Kurdi merupakan kelompok besar yang tidak memiliki negara yang otonom dan mereka beranggapan bahwa mereka adalah penduduk asli dari wilayah yang biasa dinamai dengan Kurdistan. Wilayah ini berada di Barat daya Asia, yang meliputi Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Etnis ini selalu tertindas di negara-negaranya dan diperlakukan seperti anak tiri. Hak-hak etnis ini selalu direbut oleh pemerintah penguasa, sampai dalam parlemen pun jarang diikutkan sebagai kandidat.

Kepentingan Etnis Kurdi seringkali dikesampingkan dan bahkan sering mendapatkan ancaman dan tekanan dari negara yang didudukinya. Tetapi hal tersebut tidak membuat mereka menyerah akan keadaan, mereka malah memanfaatkan yang kecil ini untuk bertarung guna mendapat hak-haknya yang seharusnya mereka dapat. Etnis ini juga menjadi sasaran para rezim penguasa. Contoh di Irak bagian Utara.

Etnis Kurdi disana meminta kemerdekaan kepada rezim, bukan mendapat kemerdekaan, melainkan serangan demi serangan yang merenggut nyawa. Menurut rezim, permintaan kemerdekaan ini adalah sebuah bentuk separatistis, sehingga harus dilawan dan dibumi hanguskan. Pemerintah Irak selalu menyalahi Etnis Kurdi sebagai biang dari kekacauan dan keributan yang terjadi di Irak.

Di Turki, banyak Etnis Kurdi yang diasingkan oleh rezim yang disebabkan oleh pemberontakan yang mereka lancarkan pada tahun 1925, 1930, dan 1937. Dan di Iran, pada tahun 1988, berhasil merebut wilayah Kurdistan Selatan (Sihbudi, 1991:139).

Etnis Kurdi adalah sebuah gambaran yang sama dengan Etnis Yahudi, yang mana mengalami penyebaran di negara-negara Eropa. Yang membedakan dari keduanya adalah yang satu memiliki negara dan satunya masih memperjuangkan hak negaranya. Etnis Kurdi dipandang banyak negara sebagai etnis yang selalu membuat gaduh. Di negara-negara Timur Tengah, upaya pengintegrasian terhadap etnis ini selalu berujung kegagalan, walaupun sudah memakai intrumen militer. Hal ini disebabkan karena tekad Etnis Kurdi untuk melakukan separatisme yang akan

melahirkan sebuah negara baru yaitu Kurdi Merdeka (Surwardono, 2011:125).

Konflik dari Etnis Kurdi yang berkepanjangan ini dan sampai sekarang belum juga reda ialah disebabkan karena hak-hak Etnis Kurdi yang selalu ditindas dan tidak diperdulikan oleh rezim negara yang mereka tempati. Ketika ingin membela hak-haknya, rezim penguasa memberikan tekanan dan serangan, dengan dalil kemerdekaan Etnis Kurdi bisa mengganggu sumber daya alam dan teritorial mereka. Puncaknya adalah Etnis Kurdi di Irak dan Suriah semakin satu frekuensi untuk mengontrol pemerintahan pusat yang sedang melemah.. Mereka akan memanfaatkan posisi politik dan militer semaksimal mungkin untuk segera mewujudkan angan-angan lama mereka, yakni berdirinya negara Kurdistan. Apalagi persenjataan dan militer disokong dari Amerika. Apabila Etnis Kurdi Irak dan Suriah kuat, maka bisa menjadi ancaman bagi pemerintah pusat dan negara perbatasan, seperti Turki (Burdah, 2017).

Menurut kriminolog George L. Kelling dan Cathrine M. Coles dalam Gladwell mengemukakan teori tentang mengapa hal remeh bisa mempengaruhi suatu fenomena sosial yang lebih besar. Keduanya menyebut teori tersebut

adalah teori *Broken Windows*. Berdasarkan teori ini, sebuah kriminalitas merupakan akibat yang tak terelakan. Menurut teori *Broken Windows*, jika jendela pecah di sebuah rumah maka masyarakat sekitar akan menarik beberapa kesimpulan, *pertama*: mereka tidak memperdulikan, *kedua*, rumah ini sudah tidak berpenghuni, dan *ketiga*, ini bukan urusan mereka, perkara ini sudah ada yang mengurus. Dalam beberapa waktu dekat akan muncul kembali jendela yang pecah, sehingga mengundang tindakan kisruh lain yang semakin meluas. Menurut para kriminolog, segala bentuk pelanggaran kecil seperti vandalisme, maka itu bisa menjadi potensi penyulut untuk terjadi hal yang lebih serius lagi (Gladwell, 2018:176).

Hal ini terjadi di dalam Etnis Kurdi. Hal yang kecil yang dialami mereka adalah menerima perlakuan rasis dari banyak negara-negara. Mereka berpendapat bahwa Etnis Kurdi adalah sumber pengacau dan selalu mencari masalah. Dan juga tidak adanya hak dan keadilan yang berpihak pada mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka bukan mendapatkan haknya, melainkan ancaman dan ancaman. Dan hal yang besar adalah Etnis Kurdi di Irak dan Suriah sudah kuat dalam hal militer, sehingga ingin kembali mewujudkan

mimpi klasik mereka, yaitu mendirikan Negara Kurdistan. Ini menjadi ancaman bagi empat negara yang di dalamnya terdapat Kurdi, namun dipastikan keempat negara tersebut akan membatalkan usaha merdeka yang dilakukan oleh Etnis Kurdi.

Sedangkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: (1). Bagaimana Sejarah Etnis Kurdi?. (2). Mengapa Konflik Terjadi di Etnis Kurdi?. (3). Bagaimana Resolusi Konflik Bagi Etnis Kurdi.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berfokus pada kajian kepustakaan. Dalam kajian ini, penulis berusaha memaparkan dan menjelaskan akar konflik Etnis Kurdi di Timur Tengah dengan menggunakan teori *Broken Windows* yang disampaikan oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling.

Teori *Broken Windows* mampu menjelaskan bahwa hal-hal yang remeh temeh bisa menimbulkan pengaruh yang sangat besar bila dibiarkan begitu saja dan tidak diperdulikan. Menurut psikolog dan petugas kepolisian sepakat bahwa jika jendela di sebuah gedung rusak dan tidak diperbaiki, maka sisa jendela akan rusak. Satu jendela yang rusak adalah sinyal tidak ada yang memperdulikannya, sehingga para

perusak lebih merusak lebih banyak jendela, karena mereka tidak ada yang menegur dan memperdulikannya. Apabila sudah membesar kasusnya, baru mereka sadar dan memperhatikannya (Sridhar, 2006:1842).

Menurut James Q. Wilson dan George L. Kelling bahwa kejahatan di jalanan terus berkembang disebabkan karena perilaku yang tidak terkendali, yang mana tidak diperhatikan oleh pihak manapun. Itu diibaratkan dengan jendela pecah pertama. Lalu yang melakukan kejahatan bukan satu orang, melainkan satu kelompok, dan lagi, ini tidak diperhatikan juga. Ini diibaratkan dengan jendela pecah kedua. Setelah itu, kejahatan meraja rela di daerah-daerah, itu karena satu pelaku kejahatan tidak diperdulikan, sehingga yang lain pun mengikutinya (Wilson dan Kelling, 1982:5).

Teori penyebaran epidemi kejahatan ini kemudian diterapkan oleh pihak kepolisian New York kisaran tahun 80-an untuk melakukan penanggulangan atas kriminalitas yang pada saat itu memuncak pesat dan pembersihan serta penyelesaian masalah-masalah dari yang kecil terlebih dahulu. Menarik dikaji, apabila teori ini diterapkan di dalam konflik Etnis Kurdi di Timur Tengah. Etnis Kurdi melakukan gerakan separatis,

dikarenakan Etnis ini tidak mendapatkan hak yang sebenarnya, mereka hanya “benalu” yang harus dibersihkan.

Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menunjang keberhasilan dalam penyebaran epidemi, antara lain: *The Law of Few* (Hukum yang Tidak Terlalu Ketat), *The Stickiness Factor* (Faktor Kelekatan), dan *The Power of Context* (Kekuatan Konteks). *Pertama*, keberhasilan penyebaran epidemi sangat bergantung kepada orang-orang yang memiliki keterampilan unik. Orang-orang ini adalah Connector, Maven, dan Salesman. Misalnya connector, ia memiliki bakat khusus, bisa membuat orang dengan cakupan sangat luas saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Ia juga bisa dengan mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari orang lain. Begitupun dengan Salesmen yang bisa merayu masyarakat untuk membeli produknya. Ia menggunakan diksi-diksi yang mampu mengikat dan mengambil hati para pelanggannya (Gladwell, 2018:172).

Kedua, penyusunan informasi dan argumentasi harus bisa membawa dampak perubahan yang signifikan. Suatu argumentasi harus disampaikan secara berulang-ulang agar mudah diingat dan bisa merangsang seseorang untuk melakukan sesuatu. *Ketiga*,

kekuatan konteks menjelaskan bahwa lingkungan bisa mempengaruhi seseorang. Sebuah epidemi akan tersebar tergantung kepada seberapa banyak orang yang mengikutinya ketika peristiwa itu terjadi (Gladwell, 2018:173).

STUDI-STUDI SEBELUMNYA

Penelitian yang dilakukan oleh Mari Toivanen dan Bahar Baser yang berjudul “Gender in the Representations of an Armed Conflict: Female Kurdish Combatants in French and British Media” yang dimuat di dalam *Middle East Journal of Culture And Communication*. Vol 9 Tahun 2016, halaman 294-314, DOI: 10.1163/18739865-00903007.

Penelitian ini menggunakan pisau analisis framing. Penelitian ini ingin mengungkap representasi media nasional terhadap wanita Kurdi yang tergabung dalam Unit Perlindungan (ypj) di Suriah. Bagaimana para wanita Kurdi dibingkai dalam media Inggris dan Prancis? Sejauh mana representasi ini memiliki gender?. Objek penelitiannya adalah media nasional Prancis dan Inggris antara tahun 2014-2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa representasi wanita Kurdi sebagai sosok yang luar biasa dan heroik serta

mendekonstruksi maskulinitas musuhnya. Di media Inggris dan Prancis, peran wanita dalam konflik yang sedang berlangsung direpresentasikan dengan tokoh-tokoh pahlawan wanita modern yang sebagian besar diagungkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrettin Sumer dan Jay Joseph yang berjudul “The Paradox of the Iraqi Kurdish Referendum on Independence: Contradiction and Hopes for Economic Prosperity” yang dimuat di dalam *British Journal of Middle Eastern Studies* Tahun 2018, halaman 1-15, DOI: 10.1080/13530194.2018.1430533.

Penelitian ini menggunakan analisis dialektis. Analisis dialektis banyak digunakan untuk memahami skenario paradoks pada tingkat masyarakat. Paradoks adalah skenario yang kontradiktif namun saling terkait yang bertahan dari waktu ke waktu, dan dialektika mengkaji kasus-kasus paradoks yang dapat menyebabkan bencana sistemik dalam sistem sosial, seperti runtuhnya suatu lembaga ekonomi atau politik. Penelitian ini ingin mengungkap paradoks yang ada di Kurdi Irak, dimana Kurdi Irak harus mengatasi ketergantungan ekonominya pada tetangganya dan sekaligus mendapatkan dukungan regional untuk kemerdekaan. Paradoks yang muncul adalah yang

berkaitan dengan kemerdekaan dan kemunduran ekonomi. Negara-negara tetangga (Baghdad, Turki, Iran) tidak menyetujui Kurdi Irak memiliki daerah otonom, disamping itu Kurdi Irak sudah melakukan referendum. Data penelitian ini berasal dari data ekonomi dari pemerintah Kurdi Irak (KRG) dan beberapa laporan Bank Dunia, mulai dari sebelum referendum sampai setelah pemungutan suara. Hasil penelitiannya adalah pemerintah Kurdi Irak sangat bergantung kepada kekuatan regional karena Kurdi Irak masih terkurung di dalam kekuatan regional. Hasil minyak pun masih dikuasi oleh kekuatan regional. Kekuatan regional tidak mendukung kemerdekaan Kurdi Irak. Negara-negara tetangga tidak ada yang mendukung mereka. Pemerintah Kurdi harus menemukan cara untuk bernegosiasi perihal posisi sulit ini, baik dengan negosiasi langsung atau melalui proxy seperti AS atau Uni Eropa. Tanpa dukungan semacam itu, proposisi paradoks kemerdekaan Kurdi akan berkelanjutan dan gerakan kemerdekaan Kurdi akan terus dikaitkan dengan bencana ekonomi regional dan hilangnya kebebasan bagi warganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Therese Lundmark yang berjudul "Political Violence in Media: A Case

Study of the Media Framing of the Kurdish Female Fighters in Northern Iraq and Syria". Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Universitas Linnaeus Sekolah Ilmu Sosial, Studi Perdamaian & Pembangunan Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pisau analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Adapun datanya berasal dari koran Inggris yang terbit selama 1 Januari 2014 dan 31 Desember 2015. Peneliti telah mengumpulkan 32 artikel dari enam koran Inggris yang berbeda-beda. Pengelompokan ini atas enam frame berbeda yang dikembangkan oleh Brigitte L. Nacos dan teori framing media dan konstruktivisme sosial. Peneliti menemukan framing di dalam artikel koran tersebut, di antaranya adalah bingkai penampilan fisik, hubungan keluarga, teroris berjuang demi cinta, pembebasan / kesetaraan perempuan dan wanita kuat dan tangguh seperti laki-laki. Peneliti menggabungkan bingkai "hubungan keluarga" dan "teroris berjuang demi cinta " menjadi satu bingkai yaitu "hubungan keluarga yang berjuang demi cinta".

HASIL PENELITIAN

Sejarah Singkat Etnis Kurdi

Etnis Kurdi berasal dari rumpun Indo-Eropa yang menduduki wilayah pegunungan di perbatasan Irak, Iran, Turki, dan Suriah sejak 8000 tahun yang lalu. Menurut Prof. Mehrdad R. Izady, seorang pakar dari Universitas Harvard, membagi sejarah Etnis Kurdi menjadi empat periode. Periode pertama (6000 SM-5400 SM) disebut periode Halaf. Berdasarkan penelusuran bahwa ditemukannya bukti-bukti arkeologi berupa lukisan dan tulisan-tulisan yang ditemukan di gunung Tell Halaf di sebelah barat Qamishli (Suriah) (Izady, 1992:73).

Periode kedua (5300 SM- 4300 SM) disebut periode Ubaid. Ubaid adalah nama sebuah gunung di Utara Irak, yang mana banyak ditemukannya peninggalan Etnis Kurdi. Penduduk Ubaid lah yang memberikan nama *Tigris* dan *Euphrates* untuk dua sungai di Irak yang mengalir dari Kurdistan menuju Mesopotamia.

Periode ketiga disebut zaman Hurri, dimana pusat kehidupan berpindah ke kawasan pegunungan Zagros-Taurus-Pontus dengan beberapa kerajaan kecil, seperti Arrap'ha, Melidi, Washukani, dan Arrata. Sekitar 2000 SM, Suku Hittite dan Mittani datang dan menetap di Kurdistan. Periode keempat disebut sebagai periode Semitik dan Turkik. Orang-orang Medes saling

berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, Arab, dan Turki sehingga mereka berasimilasi, terbukti dengan adanya kelompok-kelompok seperti Karachul, Oghaz, Devalu, Karaqich, Iva, dan lain sebagainya (Izady, 1992:74).

Mayoritas Etnis Kurdi tinggal di Iran bagian Utara, Irak Utara, Turki Tenggara, Suriah Utara dan Soviet Selatan. Namun wilayah terbesar yang diduduki Kurdi hanya di tiga negara pertama, yaitu Iran Utara, Irak Utara, dan Turki Tenggara. Secara keseluruhan, populasi Etnis Kurdi berkisar 18 juta, dengan rincian 8 juta di Turki, 5 juta di Iran, 3,4 juta di Irak dan sisanya tersebar di Suriah dan Soviet (Sihbudi, 1991:136). Etnis ini tidak termasuk ke dalam etnis Arab. Mereka memiliki bahasa berbeda yaitu bahasa Kurdi. Perbedaan etnislah yang sering kali menyulut pertikaian diantara Etnis Arab dan Etnis Kurdi. Sehingga etnis ini dicap sebagai etnis yang suka menimbulkan masalah (Sahide, 2013:3).

Periode Etnis Kurdi memperjuangkan nasibnya yaitu pada abad 19, tepatnya pada tahun 1880, ketika aksi pemberontakan yang dipimpin oleh orang Kurdi, Syekh Ubaidullah di provinsi Hakari yang berada di bawah kekuasaan Dinasti Ustmaniah (Ottoman Empire). Sebagai

wujud perjuangan, pada tahun 1897, Etnis Kurdi menerbitkan surat kabar yang diberi nama Kurdistan. Badr Khan, salah satu keluarga Kurdi ternama yang mensponsori penerbitan surat kabar ini. Tujuannya adalah untuk menyampaikan perihal-perihal tentang budaya dan perjuangan Etnis Kurdi (Sihbudi, 1991:137).

Etnis Kurdi memiliki cita-cita yaitu pendirian wilayah Kurdistan merdeka, tempat dimana bisa mengatur diri mereka sendiri tanpa kekangan seorang pun dan mempertahankan identitas serta sosial budayanya. Sementara itu, wilayah kurdistan sudah terintegrasi ke dalam negara-negara, yaitu Turki, Iran, Irak, dan Suriah, sehingga dalam mewujudkan mimpinya, Etnis Kurdi menemui kendala. Apabila ingin mewujudkan mimpinya, setidaknya harus menghadapi sekiranya tiga negara besar terlebih dahulu (Sihbudi, 1991:138).

Bisa dilihat bahwa sumber permasalahan terdapat pada Etnis Kurdi itu sendiri karena ingin memiliki wilayah yang otonom. Namun, tidak melulu kepada Etnis Kurdi, mereka melakukan ini karena diperlakukan tidak semena-mena oleh rezim negara yang mereka tempati. Mereka selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan menjadi

anak tiri. Sehingga mereka ingin bebas dan merdeka (Burdah, 2017).

Di Irak, Saddam Hussein dengan cita-cita nasionalisme Arabnya, sehingga etnis Kurdi mengalami tekanan hebat semasa kepemimpinannya. Dampak tekanan ini yaitu penghapusan etnis Kurdi dengan cara pemaksaan asimilasi Kurdi ke Arabisasi. Langkah ini hampir serupa dengan apa yang dilakukan Mustafa Kemal Attaturk, ia mendorong orang-orang Kosovo Albania dan Asyur untuk menetap di daerah Kurdi demi mengubah stuktur etnis Kurdi. Lalu Saddam melakukan operasi Anfal pada tahun 1986 sampai 1989. Operasi ini berisi tentang upaya genosida terhadap etnis Kurdi di Irak Utara. Bukan hanya Kurdi saja yang terkena dampak operasi ini etnis-etnis non-Arab lainnya yang tinggal disana pun terkena imbasnya. Menghancurkan 4.500 desa Kurdi dan 31 desa Asyur. Badan International menemukan fakta bahwa pada tahun 1988, 17.000 orang telah menghilang. Data dari jaksa Irak dan pejabat Kurdi menyebutkan sebanyak 180.000 orang tewas (Firman, 2016).

Setelah invasi pasukan AS ke Irak pada tahun 2003, yang menandakan berakhirnya kepemimpinan Saddam Husein, kondisi mengilukan Etnis Kurdi tidak berubah. Kurdistan yang terdiri

atas empat provinsi yaitu Duhok, Arbil, Selemani, dan Halabja tetap kurang diperhatikan. Meskipun Kurdistan merupakan satu-satunya daerah otonomi di Irak, tetapi orang-orang Kurdi tetap dianggap sebagai warga kelas dua bersama warga Sunni lainnya. Misalnya, perubahan undang-undang mengenai pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap saja dimonopoli oleh kelompok mayoritas yaitu kelompok Syiah. Dan juga pembagian penghasilan minyak, walaupun kilang minyak berada di wilayah Kurdistan, pembagiannya tidak adil. (Mashuri, 2017).

Sedangkan di Suriah, hubungan perjuangan Kurdi Suriah yang merujuk kepada salah satu daerah yaitu Rojava. Daerah tersebut cenderung stabil dan sangat minim gesekan dengan pemerintah. Ini disebabkan karena hubungannya dengan perang saudara di Suriah. Untuk saat ini, secara hukum Konstitusi Suriah dan Kurdi sesuai dengan otoritas legislatif dan eksekutif. Artinya masih belum ada gesekan yang berarti. Di kemiliteran, pertempuran antara PYD (Unit Perlindungan Rakyat Kurdi) dan pasukan pemerintah Suriah jarang terjadi. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Suriah di daerah Qimishli dan al-Hasakah telah berpindah tangan ke PYD. Di samping

itu, terdapat kerjasama diam-diam antara YPG dengan pasukan pemerintah Suriah untuk melawan ISIS, khususnya di utara Aleppo dan di al-Hasakah. Keberadaan Etnis Kurdi ada yang bernafaskan positif dan negatif.

Etnis Kurdi melawan dan melindungi etnis mereka dari kekerasan pemerintah pusat. Pemberontakan kecil dan besar didasarkan pada politik ketnisan. Politik etnis selalu konsisten dalam memainkan peran penting dalam pemberontakan Etnis Kurdi. Menurut Martin van Bruinessen, nasionalisme Kurdi, kesetiaan terhadap etnis, dan agama berdiri dalam hubungan yang ambivalen. Komentar serupa disampaikan oleh Olson. Dalam pandangannya, pemberontakan Syaikh Said bersifat suku dan agama, namun masih bersifat nasional (Yegen, 1996:221).

Menurut Rubin (2003), keberagaman di dunia ini menandakan bahwa bertambah kuatnya etnis Kurdi. Mereka memiliki bahasa sendiri, adat istiadat, tradisi, agama, dan suku. Dengan ini, mereka kontas berbeda dengan yang lain. Kurdi adalah orang Kurdi bukan Arab, Persia, ataupun Turki. Bahkan mereka memiliki nama khusus untuk menamai identitasnya yaitu *Kurdayet*. Kekuatan Kurdi berada di tangan orang-orang Kurdi. Sejauh ini,

mereka selalu menjaga tradisi entisnya, apabila orang Kurdi tidak menjalankan tradisi, ia dianggap bukan bagian dari Kurdi lagi. Dan yang cukup menarik yaitu mereka sangat menghargai pemberontakan; memberontak budaya lain memiliki harga yang mahal (Albert, 2013: 223).

Adapun ideologi gerakan semua etnis Kurdi yaitu ideologi marxis yang dipadukan dengan pendekatan demokrasi. Tercermin dari cita-citanya yaitu ingin memiliki wilayah yang otonom dan demokrasi. Kurdi bukan sebuah etnis tetapi sudah bisa dikatakan sebagai negara karena mereka memiliki bahasa, adat istiadat, agama, dan suku (Vali, 2003: 76).

Perjuangan Kurdi di Irak bermuara pada KDP (*Kurdistan Democratic Party*) yang didirikan pada tahun 1946 oleh Mustafa Barzani (sekarang, partai ini lebih dikenal sebagai IKR (*Iraqi Kurdistan Region*)) dan PUK (*Patriotic Union of Kurdistan*) yang didirikan oleh Jalal Talabani. Kemudian pada tahun 1992, berdiri KRG (*Kurdistan Regional Governments*). Di tahun 2005, KRG mendapat legitimasi konstitusi dari pemerintahan Irak. Sejak saat itu, KRG menjadi simbol etnis Kurdi di seluruh dunia (Mohammed, 2020: 217-218).

Puncak perjuangan mereka tercermin dalam usaha referendum pada tahun 2005 dan 2017. Namun, kedua usaha tersebut gagal karena adanya faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, dari kubu Kurdi banyak kasus korupsi, kemunduruan ekonomi yang disebabkan tentara Kurdistan Irak ikut dalam perang melawan ISIS. Alasan lain menyebutkan bahwa mayoritas aktivitas perdagangan terhubung dengan Turki, Suriah, dan Iran, yang mana negara tersebut tidak merestui referendum. Untuk faktor eksternal yaitu kurangnya dukungan internasional. Menurut Kaplan (2019), para pejabat Kurdi tidak memperhitungkan dengan jelas sampai mana dukungan internasional (Mohammed, 2020: 225).

Perbedaan pendapat para pemimpin Kurdi Irak, Turki, dan Suriah dalam memandang masa depan yang sah di Timur Tengah semakin mencolok sejak 2011. Kurdi Irak ada ingin kemerdekaan. Sebelumnya, mereka hanya ingin daerah otonomi. Sedangkan Kurdi Turki dan Suriah menyerukan federalisme dan otonomi. Para pemimpin Kurdi Turki sebenarnya mengkritik tuntutan Kurdi Irak untuk sebuah negara merdeka. Cemil Bayik, salah satu dari tiga anggota dewan eksekutif PKK, menyatakan bahwa itu akan memperkuat ISIS. Pada saat yang

sama, pemimpin Kurdi Irak Masoud Barzani menuntut agar Kurdi Suriah mendukung kelompok oposisi anti-Assad lainnya daripada menekan persatuan Suriah dengan mencari otonomi daerah (Kaya, 2017: 80-81).

Mula-mula partai-partai politik Kurdi Suriah tidak terlibat dalam demonstrasi publik melawan pemerintah Suriah dan setiap mobilisasi sosial lebih diarahkan untuk mendukung pemberontakan Kurdi di Kurdistan Irak daripada melawan pemerintah Suriah dan kebijakan domestiknya terhadap Kurdi. Pada titik ini, meskipun *Partîya Dêmkokrat a Kurd li Sûriyê* didirikan, kebangsaan Kurdi tetap menjadi masalah. Upaya partai tersebut dipusatkan pada praktik organisasi politik di Suriah, serta pada dukungan untuk revolusi 1961 Barzani di Kurdistan Irak dan pembentukan saluran komunikasi antara wilayah Kurdi dan komunitas internasional. Perjuangan melawan pemerintah Suriah belum terwujud pada saat ini. Baru pada tahun 1970-an, partai ini mulai serius menangani politik Kurdi di Suriah (Allsopp, 2014: 98).

Dalam kasus serangan pihak berwenang kepada kerumunan orang Kurdi, demonstrasi terjadi secara spontan dan tidak diorganisir oleh partai Kurdi. Tahun 1980-an, PKK hadir di

Suriah untuk kaum muda yang haus untuk terlibat dalam aksi sosial. Kaum muda ditarik dan dilatih untuk berperang di Turki melawan pemerintah Turki. Dukungan untuk PKK dalam komunitas Kurdi sangat tinggi. Kemampuan PKK untuk memonopoli pergerakan publik dan budaya Kurdi adalah konsekuensi dari pemahaman implisit antara pemerintah Suriah dan PKK. Organisasi ini tidak akan mempromosikan kegiatan politik melawan pemerintah Suriah, melainkan untuk melawan pemerintahan Turki (Allsopp, 2014: 99).

Untuk memudahkan komunikasi antar etnis, dibuatlah jaringan transnasional. Jaringan ini muncul setelah Perang Teluk 1991 dan bisa dikatakan lebih kompleks daripada aliansi antara kelompok nasionalis Kurdi dan pemerintah pusat. Misalnya, Partai Demokrat Kurdistan di Iran (KDPI) yang dipimpin oleh Qazi Mohammed, KDP di Turki yang dipimpin oleh Said Elci dan PKK (*Partiye Karkaren Kurdistane*) di Suriah yang dipimpin oleh Abdullah Ocalan. Mereka memberikan dukungan finansial, politik dan ideologis yang berasal dari LSM dan organisasi bantuan kemanusiaan (Natali, 2004: 111).

Selain itu, Kurdi juga mendapat bantuan dari kelompok diaspora Kurdi dan Eropa, yang mana memungkinkan program pendidikan dan budaya Kurdi

berkembang, termasuk publikasi berbahasa Kurdi, buku teks sekolah, konferensi akademik, organisasi budaya, telekomunikasi dan acara musik. L'Institut Kurde de Paris dan pusat studi Kurdi NAVEND di Bonn, misalnya, telah menyatukan berbagai komunitas Kurdi sebagai satu kelompok nasionalis yang bersatu. Stasiun televisi Kurdi dan sistem komunikasi satelit semakin meningkatkan rasa nasionalisme Kurdi yang tak terbatas (Natali, 2004: 112).

Dalam perjuangan Kurdi, KRG lebih memakai pendekatan moderat dan "santai tapi pasti". Strategi untuk menjadi daerah otonom menuju negara Kurdistan merdeka antara lain; pengembangan ekonomi yaitu melalui pengembangan minyak. Sejauh ini, situasi ekonomi Kurdistan Irak antara lain: penemuan delapan kilang minyak baru di wilayah KRG. KRG telah menandatangani tiga puluh tujuh kontrak dengan empat puluh perusahaan yang menghasilkan \$ 10 miliar investasi di sektor minyak terkait eksplorasi dan produksi. Di antara yang paling terkenal adalah perusahaan AS Marathon Oil dan Murphy Oil, perusahaan Spanyol Repsol dan perusahaan China Sinopec. Di antara delapan, tiga kilang ditugaskan dengan total kapasitas 200.000 bpd (barels per day). Tiga kilang di atas telah menyediakan 80 persen dari kebutuhan

energi KRG. Produksi dapat mencapai 1 juta bpd pada 2014. KRG juga memiliki potensi sekitar 100-200 triliun standar kubik gas alam. KRG siap untuk mulai mengekspor 100.000 bpd dan meningkat menjadi 150.000 bpd pada tahun 2012. Minyak mentah KRG akan diekspor dari dua ladang Kurdi, dari Taq Taq dengan truk dan dari Tawke melalui pipa yang ada ke pelabuhan Ceyhan Mediterania di Turki (Gunter, 2014: 48).

Strategi kedua yaitu pembuktian Kurdi kepada orang Arab Irak bahwa mereka benar-benar mencari perdamaian, hidup berdampingan, dan persatuan Irak. Pemilu nasional tahun 2005 dan 2010 memberi Kurdi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka adalah pembawa perdamaian dan bukan penghasut perang dengan menetapkan jarak yang sama antara Sunni dan Syiah. Dalam perselisihan mereka, Kurdi bertindak sebagai penengah untuk menjaga persatuan dan integritas teritorial Irak. Selain itu, wilayah Kurdistan juga menjadi pintu gerbang bagi investor dan kontraktor asing. Kemampuan KRG untuk menegakkan hukum dan ketertiban dengan cara menyebarkan *peshmarga*, menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin di wilayah tersebut bagi pengungsi yang masuk, wisatawan, dan anggota korps diplomatik di Baghdad,

termasuk militer AS yang memerangi pemberontakan dan kelompok teroris (Ahmed, 2012: 48).

Selain memperkuat hubungan dengan masyarakat dan pemerintah Irak, KRG juga menggalang hubungan dengan negara-negara Arab. Misalnya, Presiden KRG, Barzani melakukan kunjungan resmi ke Kuwait pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik dan komersial. Keduanya berselisih karena dulu Saddam Husein tidak mengaui kedaulatan Kuwait. Kemudian Barzani memanfaatkan hubungan buruk antara keduanya untuk mempromosikan wajah ramah komunitas Kurdi di Irak (Ahmed, 2012: 50).

Selanjutnya yaitu perjuangan model PKK. Perjuangan PKK lebih radikal daripada KRG, dan juga tidak ada keberhasilan yang didapat. PKK berdiri pada 1978 yang bertujuan untuk mendirikan negara marxis independen yang diakui secara hak politik, sosial dan budaya Kurdi di Turki. Namun, Turki telah mencap PKK sebagai gerakan teroris dan juga mendapat dukungan dari AS dan Uni Eropa. Oleh karena itu, upaya perdamaian tidaklah ada.

Selama bertahun-tahun, PKK telah mendeklarasikan sejumlah gencatan senjata sepihak dengan maksud agar pihak Turki mengarah pada

perundingan perdamaian. Dalam banyak kasus, Turki mengabaikan gencatan senjata PKK ini, menganggapnya hanya sebagai tanda kelemahan PKK dan kekalahan yang akan segera terjadi. Satu-satunya pengecualian penting terjadi pada Maret 1993, ketika Presiden Turki saat itu Turgut Ozal yang hampir menerima tawaran gencatan senjata PKK untuk dinegosiasikan. Namun, kematian mendadak Ozal pada 17 April 1993 mengakhiri upaya ini dan bahkan pertempuran yang lebih sengit pun terjadi (Gunter, 2014: 62).

Tekanan militer Turki meningkat pada akhir 1990-an yang menyebabkan pemimpin PKK Abdullah Ocalan ditangkap oleh pasukan komando Turki di Nairobi, Kenya pada 15 Februari 1999. Penangkapan Ocalan bertujuan untuk mengakhiri konflik. PKK mengumumkan gencatan senjata lagi dan menarik pasukannya dari Turki ke pegunungan Qandil. Namun, Turki terus menolak tawaran PKK untuk bernegosiasi dan menuntut untuk menyerah tanpa syarat. Pada tahun 2004, kekerasan meningkat dan puncaknya pada tahun 2012 yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Keadaan ini diperparah ketika Presiden Abdullah Gul dan PM Erdogan menjabat pada tahun 2009 (Gunter, 2014: 62-63).

Sebelum penangkapan Ocalan, ia menggerakkan PKK di Suriah dengan berafiliasi dengan Partai Uni Demokrat (PYD). PKK mendapat restu dari Suriah ketika dipimpin oleh Hafiz al-Assad dengan tujuan menekan Turki lewat tangan Kurdi. Penyebab izin ini keluar yaitu peluncuran proyek Anatolia Tenggara (GAP - *Guneydogu Anadolu Projesi*) pada tahun 1977, sebuah program besar yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya air di sungai Efrat dan Tigris. Proyek GAP bertujuan untuk mengembangkan sumber daya tanah dan air yang berguna untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di Anatolia Tenggara, sebuah wilayah yang dihuni oleh mayoritas Kurdi (Tejel, 2009: 75).

Dari sini bisa diambil benang merahnya yaitu model perjuangan KRG lebih berhasil, yang mana lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat Kurdi dan persatuan dengan Irak. Sedangkan model PKK lebih radikal karena mendapat beberapa tekanan, yang mana sulit untuk melakukan negosiasi dengan Turki. Kini PKK melebarkan sayapnya ke Suriah dan berafiliasi dengan PYD guna menekan Turki. PYD pun mendapatkan momennya untuk mendapatkan otonomi daerahnya ketika Suriah dilanda konflik

berkepanjangan. Akhirnya PKK dan PYD satu model perjuangan.

Akar Konflik Etnis Kurdi

Konflik Etnis Kurdi di Timur Tengah disebabkan karena mereka tidak diperlakukan secara adil dan selalu dianak tirikan oleh rezim penguasa. Ada alasan tertentu yang membuat rezim penguasa melakukan penekanan dan penindasan, yaitu apabila Etnis Kurdi memisahkan diri dan merdeka, maka akan mengancam teritorial dan sumber daya alam negara yang ditempati oleh Etnis Kurdi. Oleh karena itu, rezim penguasa demikian keras untuk mencegah hal itu terjadi. Apabila Etnis Kurdi ingin merdeka, setidaknya harus melawan empat negara sekaligus. Dan pertanyaan selanjutnya timbul yaitu apabila Etnis Kurdi berhasil merdeka dan memisahkan diri dari negara, maka apakah orang-orang Kurdi bisa mencukupi kebutuhan hidupnya?. Setidaknya perkara itu harus dipikirkan secara matang-matang, supaya ke depannya tidak mendapatkan masalah yang berarti.

Penulis akan mencoba memaparkan akar konflik Etnis Kurdi di Timur Tengah dengan menggunakan teori *Broken Windows* yang dipopulerkan oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling. Bagaimana epidemi

akan negara Kurdistan merdeka menyebar dan melebur ke dalam sanu bari keseluruhan Etnis Kurdi di Timur Tengah? Menurut James Q. Wilson dan George L. Kelling dalam Malcolm Gladwell, setidaknya ada tiga faktor dalam keberhasilan penyebaran epidemi, yaitu The Law of Few, The Stickiness Factor, dan The Power of Context.

Pada tahun 1919, Syeikh Mahmud mendeklarasikan kemerdekaan Sulaymaniah sebagai daerah merdeka dari Inggris. Pemberontakan ini tercatat sebagai pemberontakan besar-besaran Etnis Kurdi. Aksi yang dilancarkan oleh Syeikh Mahmud di Sulaymaniah (Kurdistan Irak) ternyata sangat berpengaruh kepada orang-orang Kurdi di Iran dan Turki (Sihbudi, 1991:137-138).

Pada tahun 1923, Syaikh Ahmad Barzani dan adiknya, Mullah Mustafa Barzani mulai berkampanye dengan tujuan mendapatkan otonomi daerah bagi wilayah Kurdistan Irak. Setelah itu, tepatnya pada tahun 1946, Mullah Mustafa Barzani mendirikan Partai Demokratik Kurdi (*Kurdish Democratic Party*). Partai ini berisikan para intelektual Kurdi dan Etnis Kurdi yang tinggal di pegunungan pun memberikan dukungan. Pada tahun 1958, Pemerintah Irak mengakui Partai Demokratik Kurdi ketika terjadi kudeta di negara tersebut.

Selain itu, Jalal Talabani mendirikan partai politik yang diberi nama Uni Patriotik Kurdistan (Patriotic Union of Kurdistan). Dulunya Jalal Talabani adalah anggota terkemuka di KDP, tetapi ia keluar disebabkan sering berbeda pendapat dengan Mustafa Barzani. Kemudian ia mendirikan PUK sebagai partai modern daripada KDP. Hingga saat ini, keduanya menjadi melodi perjuangan Etnis Kurdi di Irak. Pada tahun 1961, KDP memulai perjuangan bersenjata (Prasetyawan, 2009:76).

Pemberontakan Etnis Kurdi terhadap pemerintahan Irak sering dimanfaatkan oleh negara lain, seperti Iran dan AS yang mempunyai kepentingan di Irak. Etnis Kurdi ditempatkan sebagai *agen provocateur* yang bertindak sebagai tangan panjang kedua negara tersebut yang menginginkan Saddam Husein jatuh. Iran juga mendorong Kurdi Irak untuk membantu pasukan Iran melawan pasukan Irak dalam Perang Parsi. Akhirnya mereka berhasil menguasai Halabjah dan Sulaymaniah (dua kota yang terletak di Kurdistan Irak). Demikian halnya dengan AS yang mendorong Etnis Kurdi untuk melakukan pemberontakan tahun 1991 dengan tujuan mempermudah AS untuk menggulingkan Saddam Husein. Alasan AS ingin menggulingkan Saddam

Husein yaitu karena dinilai diktator dan represif, sehingga perlu diganti dengan pemerintahan baru yang lebih demokratis. Dengan adanya pemerintahan baru bisa menyokong rencana AS untuk menguasai sumber daya Irak. Akhirnya Saddam Husein jatuh pada tahun 2003 (Prasetyawan, 2009:80).

Perjuangan Etnis Kurdi yang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan asing justru membawa dampak yang buruk bagi orang-orang Kurdi, yang mana wilayahnya diserang setelah membantu Iran dan AS. Namun, tidak ada respon balik dari kedua negara ini untuk membantu Etnis Kurdi. Etnis Kurdi hanya dijadikan “temen sementara” oleh kedua negara tersebut. Setelah kepentingan kedua negara telah selesai, lalu mereka meninggalkan Etnis Kurdi. Dan ujungnya Etnis Kurdi hanya memperjuangkan nasibnya sendirian (Prasetyawan, 2009:82).

Aspirasi perjuangan Etnis Kurdi di Suriah terkumpul di dalam Partai Demokrasi Kurdistan Suria (*Kurdistan Democratic Party of Syria/ KDPS*) yang didirikan pada tahun 1957 oleh Osman Sabri bersama beberapa politisi Kurdi. Berdirinya partai ini untuk memperjuangkan hak budaya Kurdi, demi peningkatan ekonomi, dan perubahan demokratis. Selama ini

pemerintahan Suriah melarang orang-orang Kurdi berbicara dengan bahasa mereka di publik. Selain itu, mereka juga dilarang mendirikan partai politik khusus Kurdi, pelarangan untuk mendaftarkan anak-anak dengan nama Kurdi, dan penulis-penulis tidak diperbolehkan menerbitkan buku-buku berbahasa Kurdi (Prasetyawan, 2009:78).

KDPS tidak diakui secara legal oleh pemerintah Suriah dan tetap menjadi organisasi bawah tanah dan sampai setelah tindakan kekerasan pada tahun 1960 yang mengakibatkan beberapa pemimpin Etnis Kurdi ditangkap dan dipenjarakan atas tuduhan melakukan gerakan separatis. Pada tanggal 23 Agustus 1962, pemerintahan melakukan sensus penduduk di Provinsi Jazira yang dikuasai Kurdi, sehingga mengakibatkan sekitar 20% dari populasi Kurdi di Suriah dicabut kewarganegaraannya. Pemerintah Suriah melakukan ini dengan alasan bahwa Etnis Kurdi yang berada di Suriah berasal dari negara-negara tetangga terutama Turki. Mereka secara bertahap masuk dengan ilegal dan menetap di kota Amuda dan al-Qamishli (Prasetyawan, 2009:79).

Etnis Kurdi melakukan gerakan perlawanan ini karena mereka selalu dimarjinalkan oleh penduduk dan

pemerintah setempat. Hak-hak yang seharusnya didapat, penguasa merampasnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk merdeka dan tidak mau terikat dengan negara yang mereka tempati saat ini. Kemungkinan apabila hak-hak Etnis Kurdi diberikan, maka konflik ini akan selesai, tetapi dari pihak negara tidak menginginkan itu.

Ketika acara Arab Idol, ada satu kontestan yang bernama Parwaz Hussein yang berasal dari Kurdistan Irak. Lalu ia memperkenalkan diri sebagai orang Kurdistan Irak. Sontak para juri kaget dan bertanya-tanya. Ada salah satu juri yang mengomentarnya yaitu Ahlam, bintang pop dari Uni Emirat Arab, ia berkata “anda lebih baik memperkenalkan diri bahwa anda berasal dari Irak bukan dari Kurdistan Irak, karena Kurdistan adalah bagian dari Irak”. Lalu kejadian ini mengundang kemarahan dari Kurdistan Irak dan mengkategorikan sebagai kasus rasisme. Dari sini bisa dikatakan bahwa sentimen terhadap Kurdistan meliputi negara-negara Timur Tengah (Miladi, 2015:106).

Ketika itu Nawzad Hadi Mawlood memerintahkan tentara Kurdi untuk menahan diri dan mundur dari wilayah Kirkuk, padahal itu wilayah otonomi Kurdistan sejak 2014 dan bukan wilayah yang direbut Kurdi dari ISIS.

Tentara Peshmerga yang dikenal sadis untuk melawan ISIS, nyaris tidak melakukan apa-apa, sehingga masyarakat Kurdi di Kirkuk sangatlah kecewa dan sempat melemparinya dengan batu. Nawzad Hadi Mawlood (Pemerintahan Arbil) memiliki alasan tertentu, yaitu ia lebih mementingkan referendum dan berusaha untuk membangun jalur dialog dengan Baghdad, walaupun tanpa hasil. Di tengah tekanan dan provokasi militer dari selatan, utara, dan timur, pemerintahan Kurdistan masih berupaya keras dalam membangun komunikasi dengan pemerintah federal di Baghdad (Burdah, 2017).

Pembatalan referendum ini harga mati bagi Irak, Turki, Iran, dan Suriah. Bagi Irak, referendum ini mengancam keutuhan nasionalnya. Bagi Turki dan Iran, kemerdekaan Kurdistan dipandang sangat membahayakan keamanan nasionalnya. Sebab, wabah negara baru bisa menyebar ke Etnis Kurdi yang ada di Turki dan Iran. Saat ini, pasukan PKK (Partai Pekerja Kurdistan) banyak diberitakan telah berbaris dengan pasukan Kurdi Irak. Sebaliknya, bagi Kurdistan, referendum tak bisa dibatalkan. Mereka ingin berkompromi masalah waktu proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, mereka

saat ini mendapati tekanan militer dari mana-mana (Burdah, 2017).

Sejak awal pemimpin Turki sudah mengancam bahwa akan mengambil opsi apapun, jika Kurdistan Irak bersikeras melaksanakan referendum kemerdekaan. Kehadiran tentara Turki yang berkeliling di Irak dan Suriah Utara dengan dalih berperang melawan ISIS itu sesungguhnya untuk menghadapi gerakan separatis Kurdi di negara tersebut. Pemimpin Suriah belum banyak bicara tentang referendum Kurdistan Irak, sebab perang di dalam negeri itu masih belum reda. Sementara pemerintah Irak mulai pecah pandangannya. Antara mengambil aksi militer atau cukup dengan blokade dan disertai dengan tekanan-tekanan politik.

Langkah paling rasional bagi Irak dan negara-negara kawasan saat ini adalah melakukan tekanan sebesar-besarnya terhadap Kurdistan Irak. Jika keempat negara kawasan kompak dalam melakukan tekanan terhadap Arbil, tidak menutup kemungkinan, Kurdistan Irak berpikir untuk mengurungkan proklamasi kemerdekaannya untuk waktu dekat ini. Langkah kompak empat negara ini bisa sangat berpengaruh. Pertama, kawasan Kurdi terkepung oleh empat negara sekaligus. Jika empat negara ini memblokade jalur darat maupun udara untuk beberapa waktu,

maka pemerintahan Kurdistan pasti sangat tertekan. Apalagi Kurdi tidak memiliki akses laut lepas. Kedua, tak adanya dukungan dari negara-negara besar bagi pemerintahan Kurdistan Irak. AS, Inggris, Prancis, dan PBB sudah menolak akan referendum. Namun, banyak pengamat yang mencurigai dukungan rahasia AS bagi referendum kemerdekaan ini. Ketiga, Kurdistan tidak benar-benar solid walaupun musuh yang dihadapi adalah musuh bersama. Tidak ada sosok pemersatu. Mereka hanya berjuang untuk kemerdekaannya sendiri tanpa memandang Etnis Kurdi yang lainnya. Situasi ini tentu saja akan melemahkan Kurdistan dalam menghadapi tekanan-tekanan negara besar yang mengepung mereka (Burdah, 2017).

Etnis Kurdi di Irak seringkali menjadi sumber konflik. Ketika revolusi terjadi yang menandai berakhirnya kekuasaan Inggris, suku Arab dan Kurdi di Irak saling bekerjasama demi mempertahankan daerahnya. Setelah revolusi, pemerintah Irak berinisiasi penyatuan Etnis Kurdi ke dalam pemerintahan. Namun, fraksi ekstrem etnis ini tidak menginginkan itu, akhirnya perang pun tak terelakan. Ketiak terlaksana referendum, mayoritas Etnis Kurdi tidak memberikan suaranya. Ini menandakan bahwa Etnis Kurdi Irak

enggan dipimpin oleh bangsa Arab. Pemberontakan besar pecah ketika Etnis Kurdi melihat korupsi yang dilakukan oleh para elite dan kesewenag-wenangan pemerintah, antara lain tahun 1922-1924, 1930-1931, dan 1932 yang dipimpin oleh Shaikh Mahmud dari Sulaimaniyah (Sahide, 2013:4).

Sebagai ladang perjuangan, pada tahun 1923, kampanye yang dipimpin oleh Ahmad Barzani dan adiknya, Mulla Mustafa Barzani, bertujuan untuk mendapatkan wilayah otonom Kurdistan Irak. Lalu Mustafa Barzani mendirikan partai politik yang diberi nama Partai Demokratik Kurdi (*Kurdish Democratic Party*). Selain KDP, ada partai lain yang dibentuk oleh Jalal Talabani, yaitu Uni Patriotik Kurdistan (*Patriotic Union of Kurdistan*) (Sihbudi, 1991:137).

Pada masa kekuasaan Saddam Husein, Etnis Kurdi kerap mengalami pembantaian. Keberadaan Etnis Kurdi yang non-Arab menjadi penghalang Saddam dalam menggaungkan ambisi nasionalisme Arab. Pada tahun 1988, Saddam melakukan dua kali pembantaian dengan menggunakan senjata kimia terhadap Etnis Kurdi. Titik baliknya adalah selama perang Parsi, Etnis Kurdi justru mendukung pasukan Ayatullah Khomeini dan melawan pasukan Saddam.

Kini Kurdistan Irak berhasil memanfaatkan situasi kacau akibat perang melawan ISIS guna memperbesar pasukannya. Pasca kekalahan ISIS di Mosul, Peshmerga, milisi Kurdi Irak telah menjadi pasukan terlatih dan memiliki keterampilan bersenjata yang tangguh. Dan itu bisa menjadi modal pertama mereka untuk melakukan referendum menuju kemerdekaan, kendati mereka belum memproklamasikan kemerdekaan itu hingga kini. Namun, ada potensi Kurdistan berdiri di bumi Irak, apabila tidak ada antisipasi dari pemerintah Irak (Burdah, 2018).

Pada awalnya, Kurdi Irak memilih tak ambil bagian dalam perang melawan ISIS. Padahal, kehadirannya sangat dibutuhkan karena wilayah mereka berdekatan daerah Mosul dan mereka memiliki satuan keamanan yang potensial. Kesediaan Kurdi berbaris bersama pemerintahan Irak bukan tanpa imbalan. Menurut Ibnu Burdah, mereka bersedia bertempur karena janji politik yang tak kecil, yaitu referendum kemerdekaan wilayah Kurdistan setelah kekalahan ISIS nanti. Konsesi ini cukup masuk akal. Setelah dua tahun ikut berperang, pasukan Kurdi semakin menguat dan menguat. Pasukan itu tersebut bukan hanya mendapat pengalaman tempur di medan perang,

melainkan semakin memperkuat diri dengan peralatan pertahanan yang semakin memadai seiring dengan besarnya bantuan selama perang ISIS. Mereka juga memiliki pengalaman berkoordinasi dengan kekuatan besar dunia (Burdah, 2016).

Populasi Etnis Kurdi di Suriah berkisar 7% - 10% dari keseluruhan penduduk Suriah. Mereka tinggal di Damaskus dan Aleppo. Pihak rezim selalu menekan dan mengesampingkan hak-haknya. Sejak tahun 1960, kisaran 300.000 orang tak diakui kewarganegaraannya. Tanah Etnis Kurdi dirampas dan diberikan kepada orang Arab dalam program arabisasi wilayah-wilayah Kurdi. Ketika terjadi penentangan terhadap presiden Bashar al-Asad, Etnis Kurdi menggunakan celah ini untuk menuntut hak mereka. Partai Uni Demokrat (PYD) muncul sebagai aliansi utama dari pasukan koalisi yang dipimpin oleh AS dalam menghabisi ISIS. Pada tahun 2014, Partai Uni Demokrat (PYD) mendeklarasikan “wilayah otonom”, yaitu antara lain wilayah Afrin, Kobane, dan Jazira. Kemudian pada tahun 2016, mereka membentuk “administrasi federal”. Deklarasi ini ditentang oleh pemerintah Suriah (Viva News, 2019).

Kini, Etnis Kurdi di Suriah rupanya ingin meniru jalan yang

ditempuh oleh Etnis Kurdi Irak. Mereka dijadikan strategi baru oleh AS di Suriah. Tujuan jangka panjang AS adalah terbentuknya kesatuan tentara Kurdi yang tangguh dan terlatih, sehingga bisa menjadi modal berharga untuk kemerdekaan etnisnya. Dan keuntungan bagi AS yaitu mencegah rezim Bashar al-Asad bertahan dalam pemerintahan Suriah dan menjaga wilayah perbatasan. Apabila tidak ada tindakan dari pemerintahan Suriah dan sekutunya, maka akan sulit untuk menghentikannya. Apalagi pasukan Kurdi Suriah dibantu dan dilatih oleh AS. Pihak AS memanfaatkan momen ini karena kelompok-kelompok oposisi dinilai kurang bisa diandalkan. Kepentingan AS dan Etnis Kurdi di Suriah memiliki kepentingan yang selaras, sehingga AS membantu mati-matian.

Sebagai minoritas, penderitaan Etnis Kurdi di Irak dan Suriah sulit digambarkan. Mereka adalah etnis yang selalu direpresi oleh rezim Saddam Husein, termasuk pembantaian massal dengan gas beracun. Pengalaman pahit ini yang membuat mereka kuat dalam perang melawan ISIS. Heroisme mereka diturunkan turun temurun. Tapi ada satu hal yang mendorong etnis ini memiliki semangat patriotik yang berlipat ganda dalam menghadapi ISIS yaitu impian mereka untuk memiliki negara Kurdi di

atas tanah Kurdistan. Warga Kurdi umumnya memiliki mimpi besar untuk mewujudkan negara Kurdistan. Di tengah membesarnya kapasitas mereka baik politik dan militer, Etnis Kurdi Irak dan Suriah mengambil langkah-langkah kongkret untuk mewujudkan negara Kurdistan. Di Irak, mereka menuntut referendum agar warga menentukan nasib sendiri melalui kotak suara. Sementara di Suriah, mereka berupaya mengombinasikan perjuangan politik melalui diplomasi yang gencar dan penguasaan militer atas teritorial yang cukup luas (Burdah, 2016).

Resolusi Konflik Bagi Etnis Kurdi

Resolusi konflik memiliki hubungan yang erat dengan *counterterrorism*. Sebuah konflik terjadi ketika kedua belah pihak tidak saling sepakat tentang sebuah perkara dan sulit bagi kedua kubu untuk berdiskusi untuk kebaikan keduanya. Dari sana dapat dipastikan muncul gerakan terror dari salah satu belah pihak tersebut. Proses resolusi konflik sangat membutuhkan campur tangan politik dan pengakuan terhadap salah satu belah pihak. Dengan kata lain, resolusi konflik ialah mengontrol konflik etnis yang memiliki ancaman untuk melakukan gerakan terror (Aydinli, 2011:439).

Pada tahun 2005, tampaknya akan menjadi babak baru perdamaian bagi Kurdi Turki. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa yaitu harus memenuhi kriteria Copenhagen. Kriterianya antara lain adanya jaminan demokrasi, menegakkan hak asasi manusia, hukum yang adil, dan perlindungan kepada minoritas. Selanjutnya, tindakan Turki masih memberlakukan UU Anti-Terrorisme yang berisikan bahwa pembicaraan mengenai hak Kurdi dan membicarakan solusi untuk Kurdi terlibat dalam tindakan teroris. Melarang penyebaran propaganda dan pertemuan tertulis dan lisan yang bertujuan untuk merusak persatuan Republik Turki (Gunter, 2008: 93 & 98).

Turki memasukkan Kurdi ke dalam kelompok minoritas tetapi tidak dilindungi hukum dikarenakan tindakannya untuk menuntut merdeka. Pada tahun 2006, Hans Jorg Kretschmer, Ketua Komisi Uni Eropa di Ankara, meminta Turki untuk mengakui identitas Kurdi dan mendukung gagasan *Turkiyeli* sebagai pengganti istilah "Turki." Menurut Kretschmer, penting untuk mengenali identitas Kurdi, untuk mengakui bahwa Kurdi adalah Kurdi dan Kurdi bukan Turki. Mereka adalah

warga negara Turki dan mereka ingin menjadi warga negara Turki, tetapi mereka adalah orang Kurdi. Kenyataan itu tidak bisa disangkal. Namun Jenderal Yasar Buyukanit, Kepala Staf Umum yang baru menolak untuk menyetujui konsep Kurdi sebagai minoritas yang dilindungi hukum. Namun, tanggapan dari Kurdi Turki adalah menolak dikategorikan sebagai kelompok minoritas tetapi mereka berusaha untuk diakui sebagai "rakyat pemilih". Meskipun menjamin hak-hak demokratis penuh, status minoritas akan menyiratkan kurangnya kesetaraan sebagai warga negara (Gunter, 2008: 101-102).

Banyak yang berpendapat bahwa tidak mungkin mengusir atau membubarkan PKK (Partai Pekerja Kurdistan) dari daerah utara Irak. Pada tahun 1990 sampai tahun 2003, pemerintah Turki terus mengirimkan pasukannya, namun rentan waktu itu tidak bisa menghasilkan sebuah pencapaian. Hasil yang didapat sangat nihil. Akhirnya pemerintah Turki "banting stir", yang tujuan sebelumnya yaitu mengusir atau membubarkan PKK, sekarang lebih mengarah kepada melemahkan PKK dari segi logistik dan latihan militer yang dilakukan di daerah utara negara Irak. Melalui cara ini, PKK dan pemerintah Turki bisa bekerja sama

untuk kebaikan kedepannya. Akhirnya PKK lebih memilih mengambil jalur aman dan bisa diajak kompromi demi mendapatkan kewarganegaraannya (Aydinli, 2011:450).

Etnis Kurdi Irak telah membantu partai Baath dalam menggulingkan pemerintahan Qassem tetapi tidak menerima aturan yang diberikan oleh partai tersebut. Kemudian partai Baath berkonsolidasi dan bernegosiasi dengan Kurdi. Setidaknya partai ini sudah menunjukkan usahanya untuk mendatangkan kembali perdamaian di sebelah utara Irak ini. Pada tahun 1962, partai Baath dan Mustafa Barzani bernegosiasi dan dimoderatori oleh Tahir Yahya dari partai Baath. Ia menginginkan untuk segera diproses program desentralisasi itu, sehingga Kurdi bisa mendapat otonomi yang terbatas. Namun, kelompok garis keras nasionalis Arab menentang tindakan apapun yang akan mendamaikan Kurdi dan tidak ada kesepakatan yang tercapai dari negosiasi ini. Sungguh ironis, Kurdi yang membantu partai Baath untuk menggulingkan Qassem tetapi haknya tidak dipenuhi oleh mereka (Saito, 2002:197-198). Selama negosiasi Kurdi dengan otonomi Irak, secara diam-diam AS mendukung pemberontakan Kurdi juga.

Pada akhirnya, walaupun seluruh etnis Kurdi bisa mendapatkan haknya yaitu merdeka dari negaranya (Turki, Iran, Irak, dan Suriah), pasti akan ada masalah yang menyelimuti mereka. Sama halnya dengan negara Israel, kelompok yang sebelumnya diaspora dan tidak memiliki negara dan sekarang telah “merdeka”, selalu timbul masalah dan konflik dengan Palestina. Sampai sekarang konflik itu belum juga padam. Hal ini akan terjadi juga ketika Kurdi merdeka.

Seyogyanya, negara yang ditinggali Kurdi menghormati dan mengakui identitasnya. Sehingga dari sana bisa dibangun kerja sama dan bisa mengurangi aksi teror yang mengancam bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Konflik Etnis Kurdi di Timur Tengah disebabkan karena mereka tidak diperlakukan secara adil dan selalu dianak tirikan oleh rezim penguasa. Ada alasan tertentu yang membuat rezim penguasa melakukan penekanan dan penindasan, yaitu apabila Etnis Kurdi memisahkan diri dan merdeka, maka akan mengancam teritorial dan sumber daya alam negara yang ditempati oleh Etnis Kurdi. Oleh karena itu, rezim penguasa demikian keras untuk mencegah hal itu terjadi. Apabila Etnis

Kurdi ingin merdeka, setidaknya harus melawan empat negara sekaligus.

Ada penyebab lain yaitu Etnis Kurdi menolak peng-Arab-an dan tidak ingin dipimpin oleh Etnis Arab. Sehingga penyebaran epidemi akan otonomi wilayah Kurdistan menyebar luas dan mendarah daging. Mulai dari Etnis Kurdi di Turki. Etnis Kurdi di Irak menolak diperintah oleh suku Arab, karena mereka melihat sendiri kesewenang-wenangan pemerintah dan penindasan terhadap Etnis Kurdi. Pada tahun 1923, Mustafa Barzani mendirikan organisasi sebagai ladang perjuangan yang ia beri nama KDP dan Jalal Talabani juga mendirikan organisasi yang disebut PUK. Kedua organisasi selalu memperjuangkan hak-hak Etnis Kurdi. Puncaknya adalah pasukan Kurdi sudah mulai kuat dan terlatih, mengingat pasukan Kurdi dan pasukan Irak saling membantu dalam membasmi ISIS. Etnis Kurdi memanfaatkan keadaan kacau Irak tersebut untuk melaksanakan referendum otonomi wilayah. Agaknya sulit untuk menghentikan langkah Kurdi di Irak.

Etnis Kurdi di Suriah juga mendapatkan penindasan. Mereka tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Suriah. Ketika terjadi penentangan terhadap presiden Bashar al-Asad, Etnis Kurdi menggunakan

kesempatan ini untuk bangkit. Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) muncul sebagai aliansi utama dari pasukan koalisi yang dipimpin oleh AS dalam menghadapi ISIS. Puncaknya adalah seperti keadaan pasukan Kurdi di Irak. Pasukan Kurdi Suriah sudah kuat dan terlatih berkat AS, yang mana memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menggulingkan rezim dan mendapatkan kembali hak-hak Etnis Kurdi. Apabila tidak ada penanganan dari pihak Suriah, maka bisa terjadi lagi apa yang dialami oleh Irak. Etnis Kurdi memanfaatkan kondisi pecah ini untuk melaksanakan referendum otonomi wilayah.

Resolusi konflik bagi Etnis Kurdi adalah menunggu pengakuan identitas dari masing-masing negara yang ditinggali Kurdi. Setelah pengakuan identitas sudah dilewati, solusi untuk Kurdi akan timbul sedikit demi sedikit. Jalannya yaitu dengan negosiasi. Kurdi yang lain (Turki, Iran, Suriah) bisa melihat dan meniru startegi yang dipakai oleh Kurdi Irak dalam negosiasinya dengan Pemerintah Irak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmed, M. M. A. (2012). *Iraqi Kurds and Nation Building*. New York: Palgrave Macmillan.

Allsopp, H. (2014). *The Kurds of Syria: Political Parties and Identity in The Middle East*. I. B. Tauris & Co Ltd: London New York.

Gladwell, M. (2018). *The Tipping Point, Bagaimana Hal-Hal Kecil Berhasil Membuat Perubahan Besar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gunter, M. M. (2014). *Out of Nowhere: The Kurds of Syria in Peace and War*. London: Hurst & Company.

_____. (2008). *The Kurds Ascending: The Evolving Solution to The Kurdish Problem in Iraq and Turkey*. New York: Palgrave Macmillan.

Izady, M. R. (1992). *The Kurds: A Concise Handbook*. London: IB Tauris.

Salim, S. (2001). *حروب المنطقة العربية: الموقف السياسي المصري*. Kairo: Dar as-Syuruq.

Sihbudi, R. M. (1991). *Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan.

Surwandono., Ahmadi, S. (2011). *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tejel, J. (2009). *Syria's Kurds: History, Politics, and Society*. New York: Routledge.

- Vali, A. (2003). *Genealogies of The Kurds: Constructions of Nation and National Identity in Kurdish Historical Writing* dalam *Essays on The Origins of Kurdish Nationalism*. California: Mazda Publisher.
- Jurnal**
- Albert, C. D. (2013). A History of Violence: Ethnic Group Identity and The Iraqi Kurds. *Iran and The Caucasus*, 17 (2), 215-234.
- Aydinli, E., Ozcan, N. A. (2011). The Conflict Resolution and Counterterrorism Dilemma: Turkey Faces its Kurdish Question. *Jurnal Terrorism and Political Violence*, 23(3), 438-457.
- Danisworo, T. G., Utomo, T.C., dan Astuti, P. (2013). Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Tahun 1979-2012). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-13.
- Handayani, A. S. (2012). Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007. *Jurnal Candi*, 4, 1-20.
- Kaya, Z., Whiting, M. (2017). Sowing Division: Kurds in The Syrian War. *Middle East Policy*, 24 (1), 79-91.
- Miladi, N. (2015). Transformative Pan-Arab TV: National and Cultural Expression on Reality TV Programmes. *Journal of Arab & Muslim Media Research*, 8(2), 99-115.
- Mohammed, J. A., Alrebh, A. F. (2020). Iraqi Kurdish: The Dream of Nation State. *Digest of Middle East Studies*, 29 (2), 215-229.
- Natali, D. (2004). Transnational Networks: New Opportunities and Constraints for Kurdish Statehood. *Middle East Policy*, 11 (1), 106-131.
- Sahide, A. (2013). Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 139-145.
- Sridhar, C. R. (2006). Broken Windows and Zero Tolerance: Policing Urban Crimes. *Jurnal Economic and Political Weekly*, 41 (19), 1841-1843.
- Sumer, F., Joseph, J. (2018). The Paradox of the Iraqi Kurdish Referendum on Independence: Contradiction and Hopes for Economic Prosperity. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 1-15, DOI: 10.1080/13530194.2018.1430533.

Toivanen, M., Baser, B. (2016). Gender in the Representations of an Armed Conflict: Female Kurdish Combatants in French and British Media. *Middle East Journal of Culture And Communication*, 9, 294-314, DOI: 10.1163/18739865-00903007.

Wilson, J. Q., Kelling, G. L. (1982). Broken Windows: The Police and Neighbourhood Safety. *Atlantic Monthly*, Maret, 1-10.

Yegen, M. (1996). The Turkish State Discourse and The Exclusion of Kurdish Identity. *Middle Eastern Studies*, 32 (2), 216-229.

Skripsi dan Disertasi

Lundmark, T. (2016). Political Violence in Media: A Case Study of the Media Framing of the Kurdish Female Fighters in Northern Iraq and Syria. Skripsi, Universitas Linnaeus Sekolah Ilmu Sosial, Studi Perdamaian & Pembangunan.

Prasetyawan, G. (2009). Perjuangan Suku Kurdi Memperoleh Otonomi di Kurdistan Irak Tahun 1919-1991. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Saito, M. (2002). Nation Building and Conflict Resolution: The Kurds In Iraq and Turkey. Disertasi, Universitas St. Andrews.

Koran Online

BBC News Indonesia. (2019). Diperangi Erdogan, Tak Diakui di Suriah, Siapa Sesungguhnya Bangsa Kurdi. Dalam <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-50068256> diakses pada 30 November 2019.

Burdah, I. (2017) Menuju Negara Kurdistan Merdeka. Dalam <https://geotimes.co.id/kolom/internasional/menuju-negara-kurdistan-merdeka/> diakses pada 26 November 2019.

_____, (2017). Bara Menyala di Baghdad dan Kurdistan. Dalam <https://geotimes.co.id/kolom/internasional/bara-menyala-di-baghdad-dan-kurdistan/> diakses pada 19 Desember 2019.

_____, (2018). Hasrat Kurdistan Di Tengah Agresi Militer Turki dan Taktik Baru AS. Dalam <https://geotimes.co.id/kolom/internasional/hasrat-kurdistan-di-tengah-agresi-militer-turki-dan-taktik-baru-as/> diakses pada 20 Desember 2019.

- Detik News. (2019). Tentang Bangsa Kurdi yang Tak Punya Negara Sendiri”. Dalam <https://m.detik.com/news/dw/d-4765999/tentang-bangsa-kurdi-yang-tak-punya-negara-sendiri> diakses pada 20 Desember 2019.
- Firman, T. (2016). Kurdi, Bangsa Tanpa Negara. Dalam <https://tirto.id/kurdi-bangsa-tanpa-negara-bCPI> diakses pada 13 April 2020.
- Maenza, J. (2019). Sejarah Perjuangan Otonomi Kurdi dari Tahun 1970-an Hingga Kini. Tahun 2019 dalam <https://www.matamatapolitik.com/sejarah-perjuangan-otonomi-kurdi-dari-tahun1970-an-hingga-kini-historical> diakses pada 29 Maret 2020.
- Mashuri, I. K. (2017). Bangsa Tanpa Negara Itu Ingin Merdeka. Dalam <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/09/25/ows14m318-bangsa-tanpa-negara-itu-ingin-merdeka> diakses 13 April 2020.
- Viva News. (2019). Diperangi Turki, Tak Diakui di Suriah, Siapa Sebenarnya Bangsa Kurdi?. Dalam <https://www.vivanews.com/berita/dunia/13589-diperangi-turki-tak-diakui-suriah-siapa-sebenarnya-bangsa-kurdi> diakses pada 21 Desember 2019.

Kliping Koran

- Burdah, I. Pascareferendum Kurdistan dan Bara Timur Tengah. Pada Selasa 3 Oktober 2017. Tulisan ini dimuat di Kedaulatan Rakyat.
- _____, Perjuangan Kurdi dan Berkah Pergolakan. Pada Rabu 23 Maret 2016. Tulisan ini pernah dimuat di Jawa Pos.
- _____, Turki, Kurdi, dan Perang ISIS. Pada Rabu 31 Agustus 2016. Tulisan ini dimuat di Suara Merdeka.